Aswir F. Badjodah

Instrumentalisasi Politik Identitas

Editor : Ali Lating

eureka
media aksara
Anggota IKAPI
No. 225/JTE/2021

0858 5343 1992
eurekamediaaksara@gmail.com
JL. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362

ISBN 978-623-487-614-7
9 786234 876147

INSTRUMENTALISASI POLITIK IDENTITAS

Aswir F. Badjodah

PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

INSTRUMENTALISASI POLITIK IDENTITAS

Penulis : Aswir F. Badjodah

Editor : Ali Lating

Desain Sampul : Satria Panji Pradana

Tata Letak : Rizki Rose Mardiana

ISBN : 978-623-487-614-7

Diterbitkan oleh: **EUREKA MEDIA AKSARA, JANUARI 2023**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:
Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2023

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan bimbingan dan perlindungannya sehingga penulis dapat menyelesai penyusunan penulisan buku ini. Salawat dan salam penulis haturkan kepada jujungan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat yang sangat gigih memperjuangkan dinul Islam sehingga Islam tersebar diseluruh penjuru dunia.

Di Negara demokrasi, pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan aktivitas periodik yang diatur dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Dan Pilkada juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan demokrasi, karena pada saat itulah rakyat berkesempatan mencurahkan segala aspirasinya kepada para kandidat/partai politik dalam rangka membangun daerah dan bangsa.

Politik identitas menjadi tema pada buku kecil ini dalam rangka untuk mengambarkan peta perpolitikan daerah secara khusus dan Indonesia secara umum. Karena banyaknya suku, agama, aliran, sehingga menarik untuk dikaji secara akademik dengan konsep dan teori.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan buku ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Sehingga buku ini bisa hadir di hadapan pembaca.

Kepada kedua orang tua tercinta, Rudin F. Badjodah dan Nabiyah Hi. Yusuf (almarhumah) dan mertua, Yusup Sadaka dan Jainab Manuai. Kepada Nisma Abd. Gani, S. Pd, Istri tercinta dan kedua anak; Adlia dan Fildzah, adik Hatim, suami dan anak-anaknya (Ona, Ate, Mina), mereka semua adalah kekuatan dan inspirasi yang senantiasa selalu berdoa agar penulis sukses dalam pergolakan akademik. Semoga buku kecil ini bermanfaat bagi pembaca. Amin…

Ternate, 5 Januari 2023

Aswir F. Badjodah

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **v**
DAFTAR GAMBAR ..... **vii**
DAFTAR TABEL ..... **viii**
BAB 1 INSTRUMENTALISASI POLITIK IDENTITAS **1**
A. Peta dan Konfigurasi Etnis 1
B. Perubahan Sistem Politk dan Desentralisasi Kekuasaan 11
BAB 2 PERSPEKTIF TEORITIS **14**
A. Konflik Pilkada Sebuah Repetisi 14
B. Kajian Enisitas Perspektif Komparatif 15
C. Teori Politik Identitas 20
D. Teori Etnisitas 32
E. Instrumentalisasi Politik Identitas 41
BAB 3 KONFIGURASI ETNIS DAN BRANDING POLITIK KANDIDAT **65**
A. Strategi Pemenangan Pasangan Calon di Pilkada 2013 65
B. Proses Kontestasi Politik 65
BAB 4 PETA KEKUATAN PARTAI POLITIK DAN KONFIGURASI ETNIS **75**
A. Komposisi Partai Politik dan Anggota DPRD 75
B. Komfigurasi Etnis dan Kemenangan Kandidat 78
BAB 5 KEMENANGAN KANDIDAT PARTAI POLITIK **82**
A. Pasangan Calon (Paslon) 82
B. Visi dan Misi 84
C. Hasil Perolehan Suara Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Maluku Utara 2013 91
BAB 6 POLITIK IDENTITAS DALAM PILKADA **100**
A. Politik Identitas 100
B. Hasil Survey Elektabilitas Pasangan Calon (Paslon) Berdasarkan Identitas 106
C. Perbandingan Hasil Survey Katalis dengan Hasil Perolehan Suara Paslon 116

BAB 7 KEMENANGAN PARTAI POLITIK 121
A. Tokoh Agama yang Populer.....121
B. Dukungan Basis Massa Etnis Tobelo dan Galela (Togale).....124
C. Jaringan Ketokohan yang Terpelihara.....126
D. Politik Identitas Sebagai Strategi Pemenangan 129
E. Mengopinikan AGK Sebagai Kandidat Alternatif yang Bersih 144
F. Marketing.....148
G. Problematika yang Dihadapi AGK-Manthab di PILKADA Maluku Utara 2013 152
BAB 8 IMPLIKASI TEORITIK 155
DAFTAR PUSTAKA.....161
TENTANG PENULIS.....169

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Peta Etnis 6
Gambar 2. 1 Agk-Manthab saat Kampanye 55
Gambar 5. 1 Abdul Gani Kasuba (AGK) 82
Gambar 5. 2 Muhammad Natsir Thaib 84
Gambar 5. 3 AGK Saat bersilaturahmi dengan Pendukung 90
Gambar 5. 4 Iklan Kampanye AGK – Manthab 91
Gambar 5. 5 Spanduk Media Centre 91
Gambar 6. 1 Bagan Dalam Pertanyaan Terbuka Figur yang Paling Layak Dicalonkan Menjadi Gubernur Maluku Utara pada Pilkada 2013-2018 108
Gambar 6. 2 Bagan Tingkat Popularitas Calon Gubernur 109
Gambar 6. 3 Bagan Tingkat Kesukaan Calon Gubernur 109
Gambar 6. 4 Bagan Tingkat Elektabilitas Calon Gubernur 110

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Etnis yang ada di Provinsi Maluku Utara.....4
Tabel 1. 2 Jumlah Penduduk menurut Agama di Provinsi Maluku Utara Tahun 2013.....8
Tabel 2. 1 Multi Pemahaman tentang Politik Identitas 47
Tabel 2. 2 Instrumentalisasi Simbol Agama pada Konfigurasi Paslon 50
Tabel 2. 3 Instrumentalisasi Simbol Agama 51
Tabel 2. 4 Instrumentalisasi Simbol Etnis pada Konfigurasi Paslon 59
Tabel 4. 1 Komposisi Jumlah Kursi Partai Politik di DPRD Kota Madya Ternate pada Pemilu Legislatif Tahun 2009 76
Tabel 4. 2 Pembagian Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi di Kota Ternate.....77
Tabel 4. 3 Perolehan Suara dan kursi Partai Politik Peserta Pemilu Provinsi Maluku Utara Tahun 2009.....77
Tabel 5. 1 Perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara putaran pertama tahun 2013 per Kabupaten dan Kota 92
Tabel 5. 2 Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Putaran Kedua Tahun 2013 Per Kabupaten dan Kota.....97
Tabel 5. 3 Perolehan Suara berdasarkan Pemetaan Wilayah Basis Etnis pada putaran ke 2 98
Tabel 6. 1 Konfigurasi Agama, suku, jabatan, partai pengusung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara 2013.....103
Tabel 6. 2 Daftar Pemilih Tetap Per Kabupaten/Kota Pada Pilkada Provinsi Maluku Utara 2013 105
Tabel 6. 3 Elektabilitas Berdasarkan Gender.....110
Tabel 6. 4 Elektabilitas Berdasarkan Wilayah 111
Tabel 6. 5 Elektabilitas berdasarkan Etnis 113
Tabel 6. 6 Elektabilitas Berdasarkan Agama 114
Tabel 6. 7 Elektabilitas Berdasarkan Pekerjaan.....114

Tabel 6. 8 Elektabilitas Berdasarkan Partai 115
Tabel 6. 9 Perbandingan Perolehan suara Pilkada Putaran I dan Survey Katalis berdasarkan Identitas Wilayah 117
Tabel 6. 10 Perbandingan Perolehan suara Pilkada Putaran 2 dan Survey Katalis berdasarkan Identitas Wilayah 117
Tabel 6. 11 Dukungan Etnis Pada Putaran Ke 2 untuk AGK-Manthab 118
Tabel 6. 12 Dukungan Etnis Pada Putaran Ke 2 untuk AHM-Doa 118
Tabel 6. 13 Paslon yang Bergabung dengan AGK-Manthab Pada Putaran Ke 2 119
Tabel 6. 14 Paslon yang Bergabung dengan AHM-Doa pada Putaran 2 119

INSTRUMENTALISASI POLITIK IDENTITAS

Aswir F. Badjodah

BAB 1

INSTRUMENTALISASI POLITIK IDENTITAS

A. Peta dan Konfigurasi Etnis

Strategi pasangan KH. Abdul Gani Kasuba, Lc dan Ir. Muhammad Natsir Thaib (Agk-Manthab) untuk memperkuat Instrumentalisasi politik identitas dalam meraih pemenangan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Provinsi Maluku Utara 2013 dapat dilakukan dengan mengangkat etnis dan agama. Hal ini berkaitan dengan masyarakat Maluku Utara yang terdiri dari multi etnis dan agama, sehingga idealnya pasangan calon yang berkontestasi dalam Pilkada 2013 dapat mempertimbangkan politik identitas sebagai cara memperoleh simpati dan dukungan suara masyarakat.

Pasca Orde Baru, kajian politik identitas di Indonesia mendapat perhatian yang khusus. Pada masa ini, nuansa kajian politik identitas di Indonesia, lebih terkait pada masalah etnisitas, agama, ideologi, dan kepentingan-kepentingan lokal yang pada umumnya diwakili oleh para elit dengan artikulasinya masing-masing. Gerakan pemekaran daerah, bahkan dapat dipandang sebagai salah satu wujud dari politik identitas. Isu-isu tentang keadilan dan pembangunan daerah menjadi sentral dalam wacana politik mereka, tetapi apakah semuanya sejati atau lebih banyak dipengaruhi oleh ambisi para elit lokal untuk tampil sebagai pemimpin, merupakan masalah yang tidak selalu mudah dijelaskan.[1]

---

[1] Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita, Jakarta, Yayasan Abad Demokrasi, 2012, Hal. 3

BAB 2 PERSPEKTIF TEORITIS

A. Konflik Pilkada Sebuah Repetisi

Dinamika pilkada (pemilihan kepala daerah), khususnya di Maluku Utara 2013 oleh kelompok etnis dan agama, seringkali menjadi target kepentingan partai politik/elit politik dan kandidat, baik partai Islam maupun partai nasionalis, dalam rangka menarik simpati massa untuk meraih kemenangan. Upaya instrumentalisasi etnik dan agama dengan maksud menyamakan persepsi anggota atau perkumpulan etnis yang seragam untuk diarahkan dalam frame politik dengan memakai baju etnisitas dan adat istiadat bisa menjadi sumber masalah dalam aspek apapun, kisruh pilkada yang seringkali terjadi, menjadi contoh nyata dari perilaku politik ini.

Apabila isu etnisitas atau primordialisme diangkat dalam propaganda politik terus-menerus, bukan tidak mungkin akan menimbulkan konflik. Kekwatiran itu bukan tanpa alasan sebab masyarakat Maluku Utara dalam sejarah pernah mengalami peperangan antar kerajaan, antar para penjajah (Belanda dan Portugis) yang berlangsung cukup lama. Kemudian terjadi konflik etnis yaitu etnis Makean dan etnis Tobelo pada tahun 1999-2000, dan pilkada tahun 2001-2002 dan 2007-2008 terjadi konflik tetapi tidak berdampak luas. Konflik ini berhubungan dengan persaingan empat etnis besar, yaitu Makean, Galela-Tobelo, Sanana, Tidore, Ternate dalam memperebutkan jabatan dan kedudukan yang ada dalam struktur masyarakat, pemerintahan dan politik. Pengalaman konflik ini menjadi pertimbangan bagi elit partai dan tokoh masyarakat untuk

BAB 3

KONFIGURASI ETNIS DAN BRANDING POLITIK KANDIDAT

A. Strategi Pemenangan Pasangan Calon di Pilkada 2013

Kemenangan bagi pasangan calon (paslon) adalah tujuan yang utama dalam kontestasi pilkada. Oleh sebab itu, berbagai pendekatan dan strategi digunakan paslon untuk meraih simpati pemilih. Hal-hal yang dilakukan antara lain menampilkan konfigurasi paslon dengan etnis dan agama, menampilkan visi dan misi serta slogan yang mengangkat simbol-simbol budaya dan agama. Strategi ini diyakini akan memberi dampak yang besar pada paslon karena melihat kultur masyarakat Maluku Utara yang multi etnis agama serta karakteristik pemilih yang sebagian besar tradisional. Secara umum strategi konfigurasi etnis digunakan oleh keenam paslon, sementara konfigurasi agama hanya digunakan tiga pasangan calon. Konfigurasi ini sangat penting untuk dilakukan demi membuka ruang pilihan alternatif bagi pemilih dalam menentukan pemimpin yang dinilai mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat.

B. Proses Kontestasi Politik

1. Putaran Pertama

a. Ir. Namto H. Roba, SH-Ismail Arifin, M.Si (NHR-IA)

Pasangan ini diusung oleh partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Barisan Nasional (BARNAS), Partai Persatuan Nasional (PPN). Pasangan ini mengangkat branding politik; Maluku Utara Bersatu dan Sejahtera dalam Keberagaman Suku, adat dan

BAB 4

PETA KEKUATAN PARTAI POLITIK DAN KONFIGURASI ETNIS

A. Komposisi Partai Politik dan Anggota DPRD

Kontrol sosial terhadap aktivitas Pemerintahan baik di pusat maupun daerah perlu dilakukan sebagai perwujudan kehidupan sosial politik masyarakat demokrasi, sehingga berbagai program dan kebijakan pembangunan yang dilaksanakan oleh eksekutif dapat berjalan sesuai prosedur dan peraturan yang ditetapkan. Fungsi kontrol tersebut dalam sistem pemerintahan kita dilaksanakan oleh institusi DPR atau DPRD yang keanggotaannya dapat dipilih secara langsung oleh rakyat melalui mekanisme pemilihan umum.

Berdasarkan Pemilihan Umum tahun 2009, jumlah anggota DPRD Kota Ternate sebanyak 25 orang yang terdiri dari 21 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Beberapa partai yang berhasil memperoleh kursi di DPRD Kota Ternate adalah Partai Golkar sebanyak 6 kursi, Partai Demokrat sebanyak 3 kursi, Partai Bulan Bintang, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, PDIP, PKS, dan Partai Hanura masing-masing memperoleh 2 kursi. Bila dilihat menurut fraksi, kenggotaan DPRD Kota Ternate dibagi menjadi 4 fraksi yaitu: Fraksi Partai Golkar, Fraksi Pembaharuan, Fraksi Partai Demokrat, dan Fraksi Kerakyatan. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

BAB 5

KEMENANGAN KANDIDAT PARTAI POLITIK

A. Pasangan Calon (Paslon)

1. Abdul Gani Kasuba (AGK)

KH. Abdul Gani Kasuba, Lc merupakan salah satu pemimpin Maluku Utara saat ini yang paling terlihat menonjol dalam hal memiliki kepedulian yang besar terhadap masyarakat terutama saat masyarakat dilanda bencana beberapa tahun lalu di Maluku Utara, terbukti dari data yang diperoleh dan fakta dilapangan beliau merupakan salah satu pemimpin yang pertama turun langsung ke tempat yang dilanda bencana konflik untuk memberikan bantuan makanan, air minum, pakaian dan lain-lain.

Gambar 5. 1 Abdul Gani Kasuba (AGK)
Sumber:Google.com akses tanggal 10 November 2017 pukul 18.00 wib

BAB 6

POLITIK IDENTITAS DALAM PILKADA

A. Politik Identitas

1. Konfigurasi Politik Identitas dan Survey Elektabilitas Pasangan Calon (Paslon)

Masyarakat Maluku Utara mengharapkan terjadinya "perubahan" pembangunan diberbagai bidang, yang paling mendasar adalah bidang ekonomi. Karena kenaikan harga barang pokok menjelang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2013 sangat terasa oleh masyarakat. Sebagaimana hasil survey Katalis pada 3 Januari-4 Febuari, penyebab memburuknya ekonomi keluarga adalah kenaikan harga barang pokok di Provinsi Maluku cukup tinggi. Dalam hasil survey tersebut, sebagian responden menilai kondisi ekonomi keluarga mereka stagnan, tidak ada perubahan atau jauh lebih buruk (agregat 56,1%) dalam setahun ini, hanya 34,3% agregat dari responden yang menilai ekonomi keluarga tahun ini lebih baik. Umumnya mereka yang kondisi ekonominya memburuk menilai bahwa kenaikan harga barang pokok yang menjadi penyebabnya (38,2%, selain itu karena ada faktor lain (35%).[77]

Masyarakat Maluku Utara membutuhkan seorang pemimpin yang peduli, amanah, dan jujur serta kreatif dalam memulihkan kondisi ekonomi masyarakat yang stagnan ini. Tentunya pemimpin yang memiliki terobosan program-

[77]Katalis; Laporan Survey Pemilukada Provinsi Maluku Utara, 2013, Hal. 28

BAB 7 KEMENANGAN PARTAI POLITIK

A. Tokoh Agama yang Populer

Riset katalis dan lembaga survey Indonesia (Lsi) menempatkan AGk sebagai kandidat yang memiliki tingkat popularitas yang cukup tinggi, yaitu 62,7% dan 34,9%. Popularitas AGK sangat terkait dengan latar belakangnya sebagai seorang Dai. Profesi sebagai dai di jalani sebelum beliau menjadi anggota DPR RI dan wakil gubernur. Dengan profesi dai, maka masyarakat memberinya identitas sebagai seorang Ustad. Identitas khusus yang diberikan masyarakat sebagai bentuk pengakuan akan kapasitas yang dimilikinya. Sebagai seorang ustad tentunya akan selalu mendapat undangan ceramah dari berbagai wilayah di Maluku Utara. Dan profesi ini dijalani selama 30 tahun lebih. Sehingga masyarakat sangat mengenalnya, baik dikalangan masyarakat bawah, menengah, dan atas, dan juga di kalangan masyarakat yang beda agama.

Kecintaan masyarakat terhadap AGK ditunjukkan ketika dukungan AGK menjadi anggota DPR Pusat tahun 2004 dan terpilih menjadi wakil Gubernur mendampingi Thaib Armain sebagai Gubernur tahun 2007 yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Padahal PKS di Maluku Utara masih baru sehingga dapat dikatakan bahwa struktur kepartaian belum terbentuk sampai ke tingkatan yang paling bawah. Namun dengan ketokohan Abdul Gani Kasuba, maka Partai Keadilan Sejahtera menjadi partai yang di perhitungkan saat ini.

BAB 8 | IMPLIKASI TEORITIK

Dalam karya Paul Gilber teori tentang politik identitas menjelaskan ada dua pengertian identitas budaya yang perlu dibedakan. **Yang pertama** mengacu pada identitas individu. Dalam aspek budayanya, mungkin latar belakang dan berbagai aneka serta ciri-ciri seseorang dibesarkan dapat dilihat dalam berbagai hal, seperti bahasa dan sastranya, pendidikan, pilihan religius, dan moral, sikap dan sopan santun yang diperoleh secara sosial dan sebagainya. Fitur budaya yang disebutkan di atas akan tergantung pada konteksnya, tentang apa tanda kekhasan atau kesamaan yang relevan di dalamnya. Jadi seharusnya tidak perlu ada suatu anggapan dalam hal ini, bahwa identitas budaya dapat membahayakan kebersamaan dalam masyarakat, karena identitas budaya dapat diproduksi secara sosial dan seperti apa adanya, sangat mendalam, spesifik dalam hal karakteristik tersebut. Bagaimana seseorang mengidentifikasi dirinya sendiri, atau bagaimana orang lain mengidentifikasinya, dengan cara ini dirancang untuk menempatkannya, seperti yang dikatakan Gilbert, agar dia bisa dimengerti dan ditanggapi sesuai keinginan. Budaya identitas individu dalam pengertian ini mungkin unik bagi seseorang.

K**edua** penggunaan identitas budaya yang mengacu pada keanggotaan dari kelompok budaya. Oleh karena itu, seharusnya identitas kolektif budaya yang dimiliki oleh anggota lain dari kelompok tersebut merupakan kelompok budaya. Bukan hanya sebuah kelompok yang dikelompokkan dalam beberapa fitur/karakteristik budaya atau yang lain. Jika Scousers atau

DAFTAR PUSTAKA

Abdillah, Ubed, Politik Identitas Etnis; Pergulatan Tanda Tanpa Identitas, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2001.

Awad, Cokley dan Heppner, dkk, Research Designin Counseling, Chapter 15, Belmont: Isu-isu Konseptual dan Metodologis dalam Hubungan dengan Penelitian Multikultural, PLB FIB Universitas Pendidikan Indonesia, 2008.

Azwar, Saifuddin, Metode Penelitian, Pustaka Pelajar; Yogyakarta, 2013.

Barth, Fredrik, Kelompok Etnik dan Batasannya; Tatanan Sosial dan Perbedaan Kebudayaan, diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia oleh Nining L. Soesilo, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1988.

Dede, Mariana, Demokrasi dan Politik Desentralisasi, Graha Ilmu, Jakarta, 2008.

Doyle Paul Johnson, Teori Sosiologi Klasik dan Moderen, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Jilid II, 1995.

Field, John, Modal Sosial, Kreasi Wacana, Jakarta, 2010.

Firmanzah, Marketing Politik: Antara Pemahamandan Realitas. Edisi Revisi. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008.

Fukuyama, Franc, Trust; Kebijakan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran, Qalam, Yogyakarta, 2002.

Gilbert, Paul, Cultural Identity and Political Ethics, Edinburgh University Press, 2010.

H. Abd, Pim, Politik Lokal: Pola, Aktor, dan Dramatikalnya (Perspektif Teori Povercube, Modal dan Panggung) LP2B, 2014.

Haryanto, Partai Politik Suatu Tinjauan Umum, Liberty, Yogyakarta, 1984.

Heryaman, O, Political Marketing dan Kualitas Demokrasi, 2009.

Isac, Harold R, Pemujaan Terhadap Kelompok Etnis; Identitas Kolompok dan Perubahan politik alih bahasa diterjemahkan oleh Canisyus Marah, Jakarta Yayasan Obor Indonesia, 1993.

Jurdi, Syarifuddin, Elit Muhammadiyah dan Kekuasaan Politik: Studi Tingkah Laku Politik Elit Lokal Muhammadiyah Sesudah Orde Baru, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2004.

Kacung Marijan, Pilkada Langsung: Resiko Politik, Biaya Ekonomi, Akuntabilitas Politik dan Demonrasi Lokal, 2007.

Komarudin, R. Ujang: Strategi PKS Putihkan Jakarta, Buku Litera, Yogyakarta, 2012.

Kotler, P dan Armstrong, G, Dasar-DasarPemasaran, PT. Indeks, Jakarta, 2007.

Lawrence W, Neuman, Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif, edisi 7, PT. Indeks Jakarta, 2013.

Moleong, Lexy J, Metode Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001.

Morrisan, Metode Penelitian Survei, Kencana Jakarta, 2014.

Moussafa dan Prihatmoko Joko, Menang Pemilu di Tengah Oligarki Partai, Pustaka Belajar, Jogyakarta, 2008.

Newman, Bruce, Handbook of Political Marketing. London, Sage Publica-tion. 1999.

Nordholt, Henk Schulte dan Gerry Van Klinken, Politik Lokal di Indonesia, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007.

Nursal, Adman, Political Marketing: Strategi Memenangkan Pemilu Sebuah Pendekatan Baru Kampanye Pemilihan DPR, DPD, Presiden, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.

Oommen, T.K, Kewarganegaraan, Kebagsaan, dan Etnisitas; Mendamaikan Persaingan Identitas, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2009.

Rasyid, Ryas, Desentralisasi dan Otonomi Daerah, LIPI Press, Jakarta, 2005.

Robert. D Putnam, The Comparative Study of Political Elites, New Delhi: Prentice Hall of India, 1976.

Salim, Agus, MS, Stratifikasi Etnis; Kajian Mikro Sosiologis, Interaksi Etnis Jawa dan Cina, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2006.

Setiyono, Budi, Iklan dan Politik;Menjaring Suara dalam Pemilihan Umum, Adgol com, Jakarta, 2008.

Setyanto, Widya P, (ed..), Politik Identitas Etnis; Agama, Etnisitas, dan Ruang dalam Dinamika Politik di Indonesia dan Asia Tenggara, Salatiga, Persemaian Cinta Kemanusiaan,2009.

Sirry, Mun'im, Membendung Militansi Agama; Iman dan Politik dalam Masyarakat Moderen, Erlangga Jakarta, 2003.

Sjaf, Sofyan, Politik Etnik; Dinamika Politik Lokal di Kendari, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2014.

Sugiono, Metode Penelitian Kombinasi, Alfabeta, Bandung, 2011.

Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, Alfabeta, 2008.

Suhelmi, Ahmad"Muslim Political Elite and the Revival of the Left in Indonesian Politics, 1996-2001", (Malaysia Disertasi Ph.D di Departement Political Science International Islamic University Malaysia, 2005).

Surbakti, Ramlan : Memahami Ilmu Politik, PT Gramedia Widiasarana, Jakarta, 1992.

Sy Pahmi, Politik Pencitraan, Gaung Persada Press, Jakarta, 2010.

Tabroni, Roni, Komunikasi Politik Pada Era Multimedia, Simbiosa Rekatama Media, 2012.

Tankard, James & Severin, Werner, Teori Komunikasi, Sejarah, Metode danTerpan di Dalam Media Massa. Westport, Jakarta, 2005.

Tilaar, H.A.R, Mengindonesia Etnisitas dan Identitas Bangsa, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007.

Van Klinken, Gerry, Perang Kota Kecil; Kekerasan Komunal dan Demokrasi di Indonesia, Yayasan Obor Indonesia,Jakarta, 2007.

Wawan E. Kuswandoro, Anti Klimaks Politisasi Demokrasi Lokal, insecs publishing, Surabaya, 2008.

Yudi, Yustian, Strategi Kampanye Politik Calon Incumbent dan pendatang baru dalam Pemilihan Kepala daerah, 2008.

Sumber Jurnal :

Awad, Cokley dan Heppner, dkk, Research Designin Counseling, Chapter 15, Belmont: Isu-isu Konseptual dan Metodologis dalam Hubungan dengan Penelitian Multikultural, PLB FIB Universitas Pendidikan Indonesia, 2008.

Frets Alfret Goraph, Tesis Politisasi Adat Hibualamo (Studi Kasus Tentang Pemasaran Politik Calon Independen dalam Pilkada Maluku Utara 2013.

Kamaruddin Salim, Politik Identitas di Maluku Utara, Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan, Vol. 11 No. 02, 2015.

Kotler, P and Levy, S. 1969, 'Broadening The Concept of Marketing', Journal of Marketing, Vol. 33 (1) (January), p.10.

P.B. Strategies for Succes from The Political Marketers. The Journalof ConsumerMarketing,(6),1., 1989.

Prihartanti, Nanik dkk, Jurnal Penelitian Humaniora, Mengurai Akar Kekerasan Etnis Pada Masyarakat Pluralis, Vol. 10 No. 2 Agustus 2009.

Scammel, M. 'Political Marketing: Lessins for Political Science'. Political studies.(1999) Vol 47 (4), 718-39 dalam Jennifer Lees-Marshment. Ibid.p. 692-693.

Stephan C. M. Henneberg, Political Marketing Theory: Hendiadyoin or Oxymoron, Political Marketing Journal, 2004, Universitas of Bath School of Management, P. 10-11.

Zuly Qodir dan Tunjung Sulaksono, 2012, Politik Rente dan Konflik di Daerah Pemekaran: Kasus Maluku Utara, Working Paper No:002/JKSG/2012/p. 27.

Sumber lain:

Badan Pusat Statistika Kota Ternate, "Kota Ternate dalam Angka 2014".

Benyamin F. Intan, Gus Dur Pejuang Pluralisme Sejati, Kompas, 7 Januari 2010

Dendy Sugono/Tim Penyusun, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta, Pusat Bahasa, 2008.

Katalis; Laporan Survey Pemilukada Provinsi Maluku Utara, 2013.

Otto Gusti Madung, Proseding Seminar Internasional Multikulturalisme dan Globalisasi 2012

Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 14 Tahun 2010.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 6 Tahun 2005 tentang PILKADA, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 2005.

Seminar Internasional ke IX yang mengambil topik Politik Identitas: Agama, Etnisitas, dan Ruang atau Space dalam Dinamika Politik Lokal di Indonesia dan Asia Tenggara, diselenggarakan sejak tanggal 15-17 Juli 2008, di Kampus Percik Salatiga diakses tanggal 30 Desember 2017 pukul 14.00 wib.

Undang-Undang no 12 tahun 2008 tetang pemerintahan daerah.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

Sumber internet

(http//www.tarmizi.word press.com/2009) diakses tanggal 15 November 2017 pukul 20.00 wib

<http://www.scribd.com/doc/5988402/Political-Marketing-dan-Kualitas-Demokrasi>. Diakses tanggal 15 November 2017 pukul 21.00 wib

Diambil dan diolah dari Media centre, malutprov.go.id, akses tanggal 10 November 2017 pukul 17.00 wib.

http://mushafsalis.blogspot.com, diakses tanggal 18 November 2017 pukul 12.49 wib

http://Philosopheryn.blogspot.co, diakses tanggal 25 November 2017 pukul 10.30 wib.

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/26688/4/Chapter20I.pdfdiakses tanggal 20 November 2017 pukul 21.30 wib.

http://www.sejarah-negara.com/2017/05/peta-provinsi-maluku-utara-lengkap-8-kabupaten-2-kota.html, diakses tanggal 10 november 2017 pukul 17.00 wib

http://www.thecolourofindonesia.com/2015/10/demografi-maluku-utara.html akses rgl 22 Januari 2018 pukul 10.00 Wib.

https://id.m.wikipedia.org, diakses tanggal 14 Desember 2017 pukul 13.30 wib.

https://id.m.wikipedia.org, diakses tanggal 18 November 2017 puku 12.30 wib

https://majidbsz.wordpres.com, diakses tanggal 14 Desember 2017 pukul 13.40 wib.

https://teorimp.wordpres.com, diakses tanggal 14 Desember 2017 pukul 11.40 wib.

Oyinayashi.blogspot.com, diakses pada tanggal 23 november 2017 pukul 09.51 wib.

Rui-Diary.blogspot.co.id, diakses tanggal 1 Januari 2018 pukul 09.00 wib.

Daftar Wawancara :

Adam Ibrahim wawancara di Ternate Tanggal 13 Desember 2014 pukul 10.30-12.00 wita.

Akhsan Hasan wawancara di Ternate Tanggal 2 November 2014 pukul 17.30-18.40 wita.

Alimin Muhammad (Ketua DPW PKS Provinsi Maluku Utara) Wawancara di Ternate Tanggal 5 November 2014 pukul 09.00-10.30 wita.

Apak wawancara di Ternate tanggal 11 November 2014 pukul 14.00-14.30 wita.

Dino Umahuk (Katua Tim Relawan) Wawancara di Ternate Tanggal 15 November 2014 pukul 16.30 – 17.20 Wita.

Hadi Abubakar wawancara di Ternate Tanggal 10 Januari 2015 pukul 11.00-12.20 wita.

Muhammad Ali wawancara di Ternate Tanggal 10 November 2014 pukul 20.15-21.00 wita.

Muhammad Sadri (Malut Post) wawancara di Ternate Tanggal 19 November 2014 pukul 10.00-11.00 wita.

Mulyansah wawancara di Ternate Tanggal 25 Desember 2014 pukul 10.30-11.30 wita.

Ratna Muslim wawancara di Ternate Tanggal 7 November 2014 pukul 21.00-22.00 wita.

Saiful Ahmad (Ketua Kebijakan Publik DPW PKS Provinsi Maluku Utara) Wawancara di Ternate Tanggal 13 Desember 2014 pukul 10.30 – 12.00 wita.

Usman Kader wawancara di Ternate Tanggal 13 November 2014 pukul 17.00-18.00 wita.

Zulkifli Umar (Ketua Kaderisasi DPW PKS dan Ketua Tim Pemenangan Provinsi Maluku Utara) Wawancara di Ternate Tanggal 16 November 2014 pukul 21.00-22.30 wita.

TENTANG PENULIS

Aswir F. Badjodah

Penulis lahir di Desa Tepeleo Kecamatan Patani Utara Kabupaten Halmahera Tengah, 28 November 1977. Menyelesaikan pendidikan SD, SMP, di Kecamatan Patani, SMU/SMA di Bintauna, S1 pada program studi ilmu politik FISIP Unsrat Manado, 1997, S2 ilmu politik Unair Surabaya 2013. Menulis Skripsi dengan judul "Prospek Penyelesaian Konflik Palestina Israel (Perjanjian Damai Oslo 1993; Latar Belakang dan Implikasinya Bagi Rakyat Palestina).

Selama kuliah, aktif dalam kegiatan kemahasiswaaan. Antara lain, pengurus Badan Tadzkir Unsrat, pernah menjadi Ketua Umum Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Daerah Provinsi Sulawesi Utara 2001-2003, Sekretaris Umum Ikatan Pelajar Mahasiswa Indonesia (IPMI) Maluku Utara Manado, 2003, dan anggota Ikatan Mahasiswa Muslim (IMM) Manado 1997.

Saat ini bekerja sebagai staf pengajar pada program studi Ilmu Politik FISIP Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU), sekretaris program studi ilmu politik FISIP UMMU.

Menulis di beberapa jurnal (Syntax Transformation, Cakrawala Ilmiah, dan Kawasa). Selain itu aktif berdiskusi diberbagai forum serta melakukan penelitian, terutama dalam bidang disiplin ilmu politik tahun 2018. Pernah menjadi konsultan pemberdayaan pada program PNPM P2dtk tahun 2010 dan Pamsimas tahun 2018, Kemitraan 2019.